

PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PERAN DEWAN PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

PUBLIC PERCEPTION OF THE ROLE OF THE EDUCATION BOARD OF YOGYAKARTA CITY

Oleh: Iwan Panji Winata, Universitas Negeri Yogyakarta, iwanpanjiw@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat persepsi publik terhadap peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta periode 2014-2018. Peran tersebut meliputi peran sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan penghubung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Yogyakarta. Subyek penelitian terdiri dari Komite Sekolah, Pegawai Dinas Pendidikan, dan Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta dengan jumlah 52 orang. Instrumen yang digunakan adalah angket tertutup. Pengujian validitas menggunakan teknik korelasi *product moment* Karl Pearson, sedangkan reliabilitas instrumen menggunakan rumus koefisien *Alpha Cronbach*. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan hingga Juni 2016 persepsi publik terhadap peran sebagai badan pertimbangan pada kategori baik sebesar 63,5%, sebagai badan pendukung pada kategori baik sebesar 59,6%, sebagai badan pengontrol pada kategori baik sebesar 62,8%, dan sebagai badan penghubung pada kategori baik sebesar 65,4%. Berdasarkan keseluruhan aspek perannya, perolehan persepsi pada kategori sangat tidak baik sebesar 0,2%, pada kategori tidak baik sebesar 2,4%, pada kategori cukup sebesar 13,1%, pada kategori baik sebesar 62,7%, dan pada kategori sangat baik sebesar 21,6%.

Kata kunci: *persepsi publik, peran dewan pendidikan*

Abstract

This study aims to determine the level of public perceptions of the role of Education Board of mediator Yogyakarta City from 2014 to 2018 period. The role includes a role as an advisory, supporting, controlling, and mediator agency. This is a descriptive with quantitative approach research. The location is the Department of Education and Regional People's Representative Assembly of Yogyakarta. The subjects consisted of the School Committee, staff of Department of Education, and Member of Parliament Commission D of Yogyakarta with the number of 52 people. The instrument used was an enclosed questionnaire. The test validity that was used was the product moment correlation technique of Karl Pearson, while the reliability of the instrument that was used was Cronbach's alpha coefficient formula. The data analysis was using percentage descriptive analysis techniques. The results showed until June 2016 the public perception of the role of advisory agency is good with 63.5%, as a supporting agency is good with 59.6%, as a controlling agency is good with 62.8%, and as a mediator agency is also good with 65.4%. Based on the overall aspects of the role, the acquisition of perception at very bad category is 0.2%, at bad category is 2.4%, at good enough category is 13.1%, at good category is 62.7%, and at very good category is 21.6%

Keywords: public perception, the role of the education board

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan pasca reformasi dari sentralisasi menjadi desentralisasi diikuti dengan dikeluarkannya Undang-undang

No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dimana penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada

daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Mutu pendidikan dapat ditingkatkan dengan melakukan penguatan partisipasi masyarakat, hal ini merupakan bentuk realisasi dari demokrasi berkeadilan. Penguatan partisipasi masyarakat ini dilakukan dengan cara mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan penggalan potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Seperti yang diungkapkan oleh Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi dalam buku Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah bahwa:

“Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak (keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/industri) untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam meningkatkan mutu dan efektivitas pendidikannya. Partisipasi masyarakat tidak seharusnya hanya dalam bentuk dana, melainkan juga sumbangan pemikiran dan tenaga.”(Jalal & Supriyadi, 2001 : 99)

Peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan dapat diwadahi oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, oleh karena itu dibentuklah Dewan Pendidikan di tingkat nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota dan Komite Sekolah pada tingkat satuan pendidikan. Embrio Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sudah ada sejak tahun 1993 yaitu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0293/U/1993 tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan, kemudian

diamanatkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam Kepmendiknas tersebut Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki empat peran yang harus diemban yaitu:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*legislatif*) dengan masyarakat

Secara kuantitatif, Dewan Pendidikan kabupaten/kota dan Komite Sekolah baik negeri maupun swasta memang telah terbentuk hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Namun belum sepenuhnya keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/madrasah dapat mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan. Salah satu faktor penyebabnya antara lain karena masih kurangnya pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan (*stakeholder*) tentang kedudukan, fungsi dan tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Melihat peran dewan pendidikan dan komite sekolah tersebut tentu tidak mengherankan apabila masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap keberadaannya. Terlebih selama ini masyarakat merasa kesulitan untuk mengartikulasikan kepentingan dalam bidang pendidikan kepada pihak sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah dianggap sebagai solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa

peran dari kedua lembaga ini belum berfungsi dengan optimal. Khususnya pada dewan pendidikan, dari laporan Tim peneliti UNY (2011) mengenai “Kajian Evaluasi Dampak Kontribusi Dewan Pendidikan /Komite Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah” dengan sampel penelitian adalah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang ada di 20 Provinsi menunjukkan bahwa kinerja dewan pendidikan secara keseluruhan mendapat nilai rata-rata 62,75 yang secara kualitatif dapat dikategorikan pada nilai *sedang* dan kontribusi dewan pendidikan terhadap mutu sekolah baru 5%. Juga ditemukan bahwa dewan pendidikan (a) Belum fokus pada tugasnya sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung, sehingga pelaksanaannya belum optimal, (b) Belum ada koordinasi dan komunikasi yang baik dan erat antar anggota dewan pendidikan, antara dewan pendidikan dan dinas pendidikan, dewan pendidikan dengan sekolah, serta hubungan dengan stakeholder terkait, (c) Tidak adanya dana penunjang kegiatan dewan pendidikan sehingga pelaksanaan fungsi dan peran dewan pendidikan belum optimal, (d) Tidak adanya pelibatan dewan Pendidikan dalam menentukan kebijakan strategis bidang kependidikan, sehingga fungsi sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung tidak berjalan dengan baik dan (e) Terbatasnya personalia anggota dewan pendidikan menimbulkan dampak sulitnya melaksanakan tugas sebagai badan pengontrol (Tim Peneliti UNY, 2011: 73).

Melihat hal tersebut peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana peran yang telah dijalankan oleh Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta khususnya masa jabatan 2014-2018. Peneliti mengungkap hal tersebut melalui persepsi publik. Tingkat persepsi yang diberikan publik terhadap peran dewan pendidikan menunjukkan seberapa tingkat baik tidaknya peran tersebut dilaksanakan, semakin baik tingkat persepsi publik maka mengindikasikan bahwa

Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta telah melaksanakan peran tersebut dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi publik secara khusus dan secara keseluruhan terhadap peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta masa jabatan 2014-2018 berdasarkan aspek perannya sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), badan pendukung (*supporting agency*), badan pengontrol (*controlling agency*), dan badan penghubung (*mediator agency*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Bertujuan mendeskripsikan suatu objek atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti kemudian semua informasi atau data diwujudkan dalam angka dan analisisnya berdasarkan analisis statistik deskriptif. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu persepsi publik terhadap peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung pada Bulan April-Juni 2016 dilaksanakan di Kota Yogyakarta, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta.

Prosedur

Teknik pengambilan data dilakukan dengan survei menggunakan kuesioner penelitian dengan model *numerical rating scale* berskala 1-5 dengan tingkatan dari sangat tidak baik sampai sangat baik. Sebelum kuesioner digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dengan *expert judgement* sementara uji reliabilitas menggunakan teknik *Alpha Cronbach* dengan bantuan program SPSS.

Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah “publik” yaitu kelompok masyarakat kota Yogyakarta yang memiliki kepentingan dalam

bidang pendidikan namun keberadaan/tempat tinggalnya tersebar. Agar lebih operasional (bisa dihitung, bisa diukur) maka ditetapkan populasi sasaran (*target population*).

Tabel 1. Populasi Sasaran

No	Populasi Sasaran	Responden
1	Komite Sekolah	990
2	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	193
3	Komisi D DPRD Kota Yogyakarta	10
JUMLAH		1193

.Penetapan responden penelitian tersebut tidak didasarkan atas pertimbangan jumlah saja tetapi juga memperhatikan kepentingan dari penelitian ini, bahwa tidak semua populasi sasaran memiliki pengalaman terhadap peran Dewan Pendidikan. Untuk menghindari hal tersebut maka setiap kelompok populasi sasaran hanya diambil kepala lembaga/satuan kerja saja ataupun yang mewakili, sehingga jumlah responden yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Responden yang Ditetapkan

No	Populasi Sasaran	Responden
1	Komite Sekolah	66
2	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	32
3	Komisi D DPRD Kota Yogyakarta	10
JUMLAH		108

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin

$$\eta = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Menggunakan taraf kesalahan 10% didapatkan jumlah sampel sebanyak 51,92307. Untuk mengetahui proporsi sampel dari setiap populasi sasaran digunakan teknik *proportional random sampling* sebagai berikut:

Tabel 3. *Proportional Stratified Random Sampling*

No	Populasi Sasaran	Perhitungan Sampel	Responden
1	Komite Sekolah	$\frac{66}{108} \times 52$	32
2	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	$\frac{31}{108} \times 52$	15
3	Komisi D DPRD Kota Yogyakarta	$\frac{10}{108} \times 52$	5
JUMLAH			52

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu uraian yang berupa penggambaran untuk menjelaskan jawaban yang diberikan responden pada skala instrumen. Pengolahan data dilakukan dengan program SPSS, *numerical rating scale* pada instrumen digunakan untuk menjelaskan serta mengetahui kategori dan jumlah frekuensinya sehingga memudahkan dalam penentuan kesimpulan hasil penelitian. Tingkat persepsi publik diketahui dengan melihat persentase jumlah skala yang dipilih oleh responden.

Tabel 4. *Numerical Rating Scale* Persepsi Publik Terhadap Peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta

No	Pokok Aspek Peran	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Pertimbangan (<i>advisory agency</i>)					
2	Pendukung (<i>supporting agency</i>)					
3	Pengontrol (<i>controlling agency</i>)					
4	Penghubung (<i>mediator agency</i>)					

Keterangan pilihan kolom skor adalah sebagai berikut:

1 = sangat tidak baik

2 = tidak baik

3 = cukup

4 = baik

5 = sangat baik

Rumus persentase yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka Persentase

f = Frekuensi yang dicari

N = Number of Case (jumlah frekuensi)

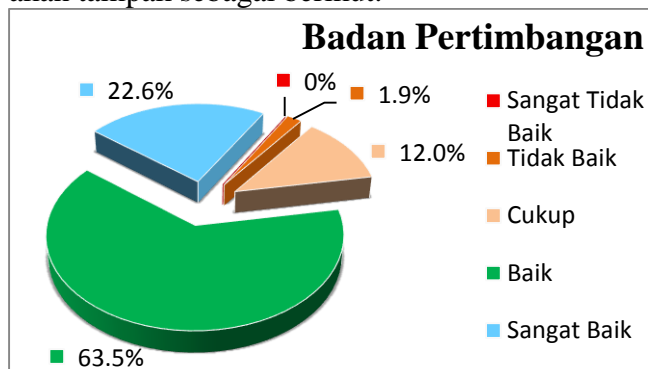
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengukuran persepsi publik terhadap peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Peran Dewan Pendidikan sebagai Badan Pertimbangan

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Baik	0	0%
Tidak Baik	4	1,9%
Cukup	25	12,0%
Baik	132	63,5%
Sangat Baik	47	22,6%
Total	208	100

Apabila ditampilkan dalam bentuk *pie chart* maka akan tampak sebagai berikut:

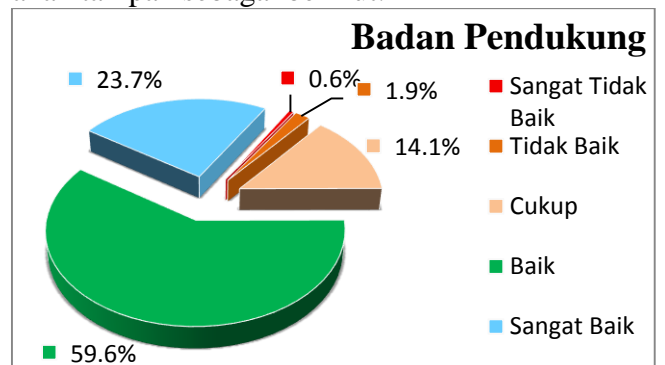


Berdasarkan hasil analisis aspek peran, ditemukan bahwa peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai badan pertimbangan berada pada kategori baik dengan persentase 63,5%. Sementara itu, 22,6% responden mempersepsikan dengan sangat baik dan 12% menyatakan cukup. Namun, masih terdapat 1,9% responden yang memberikan persepsi pada kategori tidak baik.

Tabel 6. Peran Dewan Pendidikan sebagai Badan Pendukung

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Baik	1	0,6%
Tidak Baik	3	1,9%
Cukup	22	14,1%
Baik	93	59,6%
Sangat Baik	37	23,7%
Total	156	100

Apabila ditampilkan dalam bentuk *pie chart* maka akan tampak sebagai berikut:

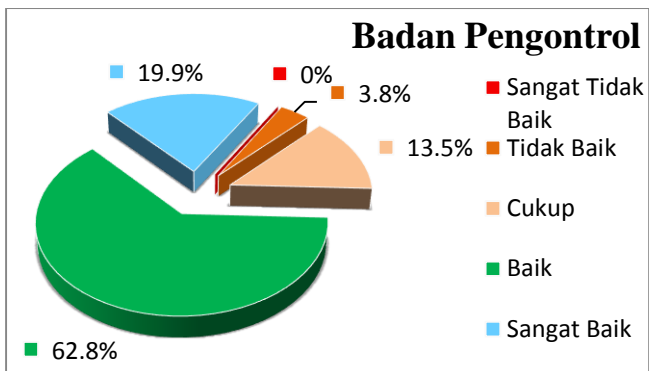


Sebagai badan pendukung, ditemukan bahwa aspek peran tersebut pada kategori baik dengan persentase 59,6%. Sementara itu, 23,7% responden mempersepsikan dengan sangat baik dan 14,1% menyatakan cukup. Namun, masih terdapat 1,9% responden yang memberikan persepsi pada kategori tidak baik dan 0,6% menyatakan sangat tidak baik.

Tabel 7. Peran Dewan Pendidikan sebagai Badan Pengontrol

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Baik	0	0%
Tidak Baik	6	3,8%
Cukup	21	13,5%
Baik	98	62,8%
Sangat Baik	31	19,9%
Total	156	100

Apabila ditampilkan dalam bentuk *pie chart* maka akan tampak sebagai berikut:

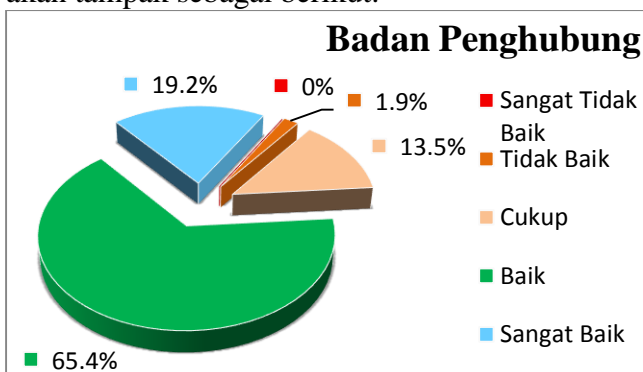


Berdasarkan hasil analisis aspek peran, peneliti menemukan bahwa peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai badan pengontrol berada pada kategori baik dengan persentase 62,8%. Sementara itu, 19,9% responden mempersepsikan dengan sangat baik dan 13,5% menyatakan cukup. Namun, masih terdapat 3,8% responden yang memberikan persepsi pada kategori tidak baik pada ketiga sub indikatornya.

Tabel 8. Peran Dewan Pendidikan sebagai Badan Penghubung

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Baik	0	0%
Tidak Baik	2	1,9%
Cukup	14	13,5%
Baik	68	65,4%
Sangat Baik	20	19,2%
Total	104	100

Apabila ditampilkan dalam bentuk *pie chart* maka akan tampak sebagai berikut:



Sebagai badan penghubung, peneliti menemukan bahwa persepsi yang diberikan publik terhadap aspek peran tersebut berada pada kategori baik dengan persentase 65,4%. Sementara itu, 19,2% responden mempersepsikan dengan sangat baik dan 13,5% menyatakan cukup. Namun, masih terdapat 1,9% responden

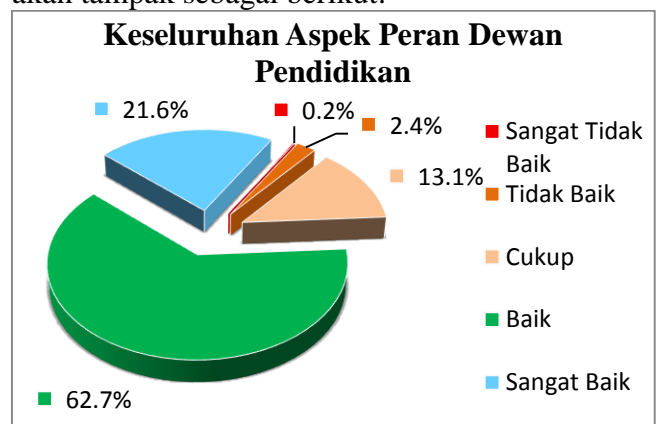
yang memberikan persepsi pada kategori tidak baik.

Tabel 9. Persepsi Publik Secara Keseluruhan Terhadap Aspek Peran Dewan Pendidikan

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Baik	1	0,2%
Tidak Baik	15	2,4%
Cukup	82	13,1%
Baik	391	62,7%
Sangat Baik	135	21,6%
Total	624	100%

Tabel distribusi total frekuensi kategori tersebut menunjukkan secara keseluruhan peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta telah dianggap baik oleh mayoritas publik dengan persentase kategori sebesar 62,7%. Pada kategori sangat baik sebanyak 21,6%, sedangkan pada kategori cukup sebanyak 13,1%. Namun masih terdapat 2,4% dengan kategori tidak baik dan 0,2% dengan kategori sangat tidak baik.

Apabila ditampilkan dalam bentuk *pie chart* maka akan tampak sebagai berikut:



SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai persepsi publik terhadap peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta masa jabatan 2014-2018 maka dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa hingga Bulan Juni 2016, mayoritas persepsi publik terhadap peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta berada pada kategori baik dengan rincian sebagai berikut:

1. Persepsi publik secara khusus terhadap peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta masa jabatan 2014-2018 menunjukkan bahwa:
 - a. Mayoritas publik mempersepsikan peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) pada kategori baik, yaitu sebanyak 63,5% responden. Adapun yang beranggapan sangat baik sejumlah 22,6% dari total responden, kategori cukup sejumlah 12,0%, untuk kategori tidak baik dipilih oleh 1,9% responden, sedangkan pada kategori sangat tidak baik tidak ada responden yang memilihnya atau 0%.
 - b. Mayoritas publik mempersepsikan peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai badan pendukung (*supporting agency*) pada kategori baik, yaitu sebanyak 59,6% responden. Adapun yang beranggapan sangat baik sejumlah 23,7% dari total responden, kategori cukup sejumlah 14,1%, untuk kategori tidak baik dipilih oleh 1,9% responden, sedangkan pada kategori sangat tidak baik terdapat 0,6% responden yang memilihnya.
 - c. Mayoritas publik mempersepsikan peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) pada kategori baik, yaitu sebanyak 62,8% responden. Adapun yang beranggapan sangat baik sejumlah 19,9% dari total responden, kategori cukup sejumlah 13,5%, untuk kategori tidak baik dipilih oleh 3,8% responden, sedangkan pada kategori sangat tidak baik tidak ada responden yang memilihnya atau 0%.
 - d. Mayoritas publik mempersepsikan peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai badan penghubung (*mediator agency*) pada kategori baik, yaitu sebanyak 65,4% responden. Adapun yang beranggapan sangat baik sejumlah 19,2% dari total responden, kategori cukup sejumlah 13,5%, untuk kategori tidak baik dipilih oleh 1,9% responden, sedangkan

pada kategori sangat tidak baik tidak ada responden yang memilihnya atau 0%.

2. Persepsi Publik secara Keseluruhan terhadap Peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2018:

Berdasarkan kategori skala perolehan persepsi dari keseluruhan aspek peran Dewan Pendidikan, maka menunjukkan bahwa mayoritas publik memberikan persepsi pada kategori baik dengan jumlah 62,7% responden. Adapun yang beranggapan sangat baik sejumlah 21,6% dari total responden, kategori cukup sejumlah 13,1%, untuk kategori tidak baik dipilih oleh 2,4% responden, sedangkan pada kategori sangat tidak baik terdapat 0,2% responden. Hal ini menggambarkan bahwa hingga Bulan Juni 2016, interpretasi serta tanggapan publik atas peran sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan penghubung telah dilaksanakan dengan baik oleh Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta masa jabatan 2014-2018.

Saran

1. Secara khusus terhadap peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta masa jabatan 2014-2018 berikut ini adalah saran dari peneliti:
 - a. Mayoritas publik mempersepsikan peran dewan pendidikan sebagai badan pertimbangan sudah baik, namun demikian masih terdapat responden yang mempersepsikan sebaliknya. Dalam hal ini yang dipersepsikan tidak baik adalah dalam hal memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi mengenai kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan, guru/tutor dan kepala satuan pendidikan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada dewan pendidikan untuk lebih mendekatkan diri kepada Dinas Pendidikan karena dimulai dari kedekatan ini maka dewan pendidikan dapat lebih mudah untuk memasukkan pikiran serta rekomendasi terkait hal

tersebut. Selain itu dewan pendidikan juga perlu memberikan penjelasan kepada stakeholder bahwa pikiran serta rekomendasi yang diberikan terkait tenaga daerah dalam bidang pendidikan juga dibatasi oleh peraturan.

- b. Mayoritas publik mempersepsikan peran dewan pendidikan sebagai badan pendukung sudah baik, namun demikian masih terdapat responden yang mempersepsikan sebaliknya. Pada aspek peran ini yang menjadi sorotan adalah peran dalam memberi dukungan finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Peneliti menyarankan kepada dewan pendidikan untuk mulai mencari sumber dana lain sesuai ketentuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan AD/ART dewan pendidikan. Sumber dana tersebut dapat digunakan sebagai penunjang program kegiatan dewan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, kepada *stakeholder* pendidikan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama termasuk dalam hal pendanaan pendidikan, sehingga diharapkan *stakeholder* pendidikan memahami tanggung jawab tersebut.
- c. Mayoritas publik mempersepsikan peran dewan pendidikan sebagai badan pengontrol sudah baik, namun demikian masih terdapat responden yang mempersepsikan sebaliknya. Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh dewan pendidikan lebih bersifat koordinatif dengan dinas pendidikan dan komite sekolah dan tidak secara langsung turun ke lapangan. Sementara yang melakukan eksekusi pengawasan dilakukan oleh dinas pendidikan dan komite sekolah yang secara teknis memiliki akses lebih luas di lapangan. Oleh sebab itu dewan pendidikan perlu membuat program terkait pengawasan dengan jelas dan

mensosialisasikannya. Dewan pendidikan harus lebih mempererat hubungan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pengawas sekolah dan dinas pendidikan, dengan demikian kedekatan yang terjalin dapat dimanfaatkan untuk menggali informasi mengenai kondisi pendidikan di lapangan yang sedang terjadi.

- d. Mayoritas publik mempersepsikan peran dewan pendidikan sebagai badan penghubung sudah baik. Apabila dihubungkan antara pengertian mediasi, iklim pendidikan di Kota Yogyakarta, dan peran dewan pendidikan sebagai badan penghubung (*mediator agency*), maka wajar apabila peran sebagai mediator memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan tiga aspek peran yang lain. Meskipun konflik dalam bidang pendidikan cenderung rendah bukan berarti peran sebagai mediator antara masyarakat dan institusi pendidikan tidak perlu dioptimalkan. Dewan pendidikan tetap perlu menjalin kerja sama antar institusi dan masyarakat serta memberikan pemahaman terhadap regulasi suatu kebijakan agar hak dan kewajiban setiap *stakeholder* dapat dijalankan dengan baik sehingga iklim pendidikan yang kondusif tetap terjaga. Keikutsertaan dewan pendidikan dalam perumusan kebijakan pendidikan dapat dimanfaatkan dalam rangka menanggulangi konflik, maka dewan pendidikan juga harus memiliki kemampuan untuk melihat potensi-potensi konflik yang dapat ditimbulkan dari suatu kebijakan, sehingga konflik dapat dicegah secara preventif.
- e. Berdasarkan keseluruhan aspek peran, dewan pendidikan mendapatkan persepsi yang baik dari mayoritas publik yang ditunjukkan dengan 62,7% responden yang memilih pada kategori tersebut. Adapun persepsi yang sebaliknya terletak

pada peran dewan dalam memberi pertimbangan mengenai kriteria tenaga daerah, serta dukungan finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh dewan pendidikan juga belum bisa leluasa menjangkau ke setiap institusi. Oleh karena itu peneliti menyarankan kepada dewan pendidikan yang pertama untuk memperkuat *internal institutional* dalam keanggotaan dewan pendidikan dan menyamakan visi dan misi antar anggota. Kemudian dewan pendidikan harus lebih menguatkan koordinasi antara DPRD Kota, Dinas Pendidikan, dan Komite Sekolah serta menjalin kedekatan sehingga permasalahan pendidikan dapat diselesaikan secara bersama. Dewan pendidikan juga perlu memulai untuk mencari sumber pendanaan lain yang sah sebagai pendukung dalam pelaksanaan program kerja. Kuatnya hubungan internal antar anggota dewan pendidikan yang didasari atas kesamaan visi dan misi, serta koordinasi yang kuat antar institusi pendidikan, dan komitmen bersama inilah yang dapat membawa kualitas pendidikan di suatu daerah menjadi lebih baik. Simpulan dapat bersifat generalisasi temuan sesuai permasalahan penelitian, dapat pula berupa rekomendatif untuk langkah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fasli, Jalal & Dedi, Supriyadi. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Tim Peneliti UNY. (2011). "Kajian Evaluasi Dampak Kontribusi Dewan Pendidikan/Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah." *Laporan Penelitian Kerjasama Setditjen Dikmen dengan UNY*.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.